

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bencana erupsi Merapi merupakan fenomena alam yang terjadi secara reguler setiap dua tahun, empat tahun atau lima tahunan. Namun, erupsi merapi yang terjadi pada bulan Oktober dan November 2010 adalah erupsi yang paling parah sepanjang sejarah. Erupsi disertai dengan guguran hujan abu vulkanik gunung Merapi dan terjangan lahar dingin di dua provinsi yang berdekatan yaitu Provinsi Jawa Tengah (Boyolali, Klaten, Magelang) dan D.I Yogyakarta (Sleman). Selain itu, bencana juga menyebabkan lumpuhnya ekonomi masyarakat karena sarana-sarana perekonomian seperti pasar, perkebunan dan hutan rusak akibat terjangan lahar dan awan panas, abu vulkanik dan banjir lahar dingin.

Kabupaten Sleman adalah daerah yang mengalami kerusakan paling parah akibat bencana Merapi karena guguran lahar dan awan panas, abu vulkanik dan terjangan lahar dingin cenderung bergerak ke arah selatan. Secara otomatis, Kabupaten Sleman juga mengalami kerugian yang paling besar dibandingkan dengan kabupaten lainnya. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sleman, total nilai kerusakan dan kerugian akibat bencana merapi adalah Rp5,4 miliar. Nilai kerusakan dan kerugian ini dihitung dengan mengklasifikasikan kerusakan dan kerugian tersebut atas lima sektor yaitu perumahan,

infrastruktur, sosial, ekonomi dan lintas sektor. Dari kelima sektor itu, nilai kerusakan yang paling tinggi adalah pada sektor perumahan yaitu Rp446.3 miliar rupiah.

Pasca erupsi Merapi, pemerintah bersama lembaga-lembaga donor telah melakukan beberapa tindakan untuk memulihkan (*recovery*) rumah-rumah penduduk. *Recovery* perumahan masyarakat pasca erupsi Merapi dilakukan dengan tiga tahap, yang meliputi: *Tahap pertama*; penduduk ditampung di barak pengungsian sampai pembangunan hunian sementara selesai. *Tahap kedua*; penduduk tinggal di hunian sementara. Pada tahap ini, pembangunan hunian tetap mulai berproses. *Tahap ketiga*, penduduk tinggal di hunian tetap pada lokasi yang direkomendasikan. (Wawancara Bapak Syaiful Bahri, selaku Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kab. Sleman).

Dari ketiga tahapan itu, ditargetkan selesai pada tahun 2013. Aktivitas yang akan dilakukan selanjutnya adalah mempersiapkan hunian tetap bagi penduduk yang terkena dampak bencana merapi. Pemerintah telah mengeluarkan Keppres No. 16 Tahun 2011 tentang Tim Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca bencana Gunung Merapi di D.I Yogyakarta dan Jawa Tengah. Dengan keluarnya Keppres ini, maka proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Merapi, termasuk pembangunan kembali rumah-rumah penduduk, sudah bisa dilakukan karena sudah memiliki dasar hukum yang jelas.

Erupsi Merapi yang terjadi tahun 2010 berbeda dengan erupsi sebelumnya. Erupsi kali ini berdampak ke arah selatan dan barat daya.

Sleman). Pemerintah telah menetapkan bahwa daerah-daerah yang dilalui oleh lahar panas dan lahar dingin Merapi harus dikosongkan. Daerah itu disebut dengan kawasan terdampak langsung atau Kawasan Rawan Bencana (KRB). Kawasan Rawan Bencana dibagi berdasarkan tingkatan bahaya yakni KRB 3, KRB 2 dan KRB 1. Di kawasan KRB 3 (Dusun Kinahrejo/Palemsari dan Pangukrejo) tidak boleh ada hunian tetap karena dapat membahayakan keselamatan penduduk jika erupsi Merapi terjadi kembali. Implikasinya adalah mereka harus direlokasi ke tempat yang lebih aman atau di luar KRB 3.

Tabel 1. Jumlah Rumah di Kawasan Rawan Bencana

Kawasan	Jumlah Rumah	Jumlah KK	Jumlah Jiwa
KRB 3	6.860	8.527	25.006
KRB 2	9.648	12.444	43.323
KRB 1	98.900	111.585	383.281

Sumber: DPPD Kab. Sleman

Pasca erupsi Merapi, masyarakat yang rumahnya terkena dampak bencana, untuk sementara ditampung di *shelter-shelter* atau hunian sementara yang telah disediakan oleh pemerintah. Hunian sementara tidak berada di kawasan rawan bencana. Berkaitan dengan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi rumah pasca erupsi Merapi, ada dua alternatif kebijakan yang bisa ditempuh oleh pemerintah yaitu kebijakan menjadikan hunian sementara menjadi hunian tetap dan kebijakan relokasi. Kebijakan relokasi diambil karena banyak masyarakat yang tidak mau direlokasi di lokasi hunian sementara karena memiliki tanah di lokasi lain di luar Kawasan Rawan Bencana, sehingga mereka lebih memilih direlokasi ke tempat yang baru. Kebijakan relokasi adalah kebijakan memindahkan rumah masyarakat ke tempat baru yang berada di luar KRB.

Lokasi relokasi harus berada di tempat yang aman. Lokasi relokasi harus

berada di luar jalur lintasan lahar panas dan lahar dingin Merapi (KRB). Hal ini penting untuk diperhatikan guna melindungi masyarakat dari ancaman Merapi berikutnya.

Dalam melakukan relokasi pascaerupsi Merapi, ada beberapa prinsip yang harus dipertimbangkan agar kebijakan relokasi tidak merugikan masyarakat.

Pertimbangan pilihan dalam kebijakan relokasi pascaerupsi merapi yaitu:

- a) Daerah relokasi tidak terlalu jauh dari tempat asal agar masyarakat tidak tercerabut dari budayanya.
- b) Desain memenuhi kelayakan, luas bangunan minimal 36 m² dengan luas tanah 150 m².
- c) Model bangunan boleh sesuai dengan selera masyarakat. (BPBD Kab. Sleman)

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta menyiapkan lahan untuk Hunian Tetap (HunTap) warga seluas 24 ha di wilayah yang lebih aman untuk dihuni di Kecamatan Cangkringan dan Ngemplak Kabupaten Sleman. Di lokasi tujuan hunian tersebut, masing-masing warga akan mendapat lahan untuk rumah 100m², ditambah untuk fasum dan fasos 50m² per rumah, sehingga menjadi 150m²/KK. Rehabilitasi dan rekonstruksi akan dilaksanakan melalui REKOMPAK dengan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam membangun rumah tahan gempa dan menata lingkungan pemukiman mereka;
2. Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam menyusun Rencana Penataan Permukiman (RPP)/Community Settlement Plan (CSP) yang berorientasi pada pengurangan risiko bencana untuk memperbaiki lingkungan tempat tinggalnya;
3. Terbangunnya rumah tahan gempa untuk warga korban erupsi Merapi;
4. Terbangunnya infrastruktur lingkungan permukiman di desa yang terkena dampak bencana Merapi berdasarkan Rencana Penataan Permukiman

Permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah terkait relokasi dan pembangunan hunian tetap adalah: Pertama, banyak warga masyarakat yang tidak mau direlokasi karena alasan ekonomi. masyarakat di Dusun Pangukrejo Desa Umbulharjo tidak mau direlokasi karena batas tanah masih jelas, perekonomian sudah relatif normal kembali, kalau ada awan panas bersedia dievakuasi. Untuk mengatasi persoalan ini, pemerintah sebaiknya melakukan pendekatan secara persuasif kepada masyarakat, mengingat KRB 3 adalah daerah dengan tingkat kerawanan yang paling tinggi sehingga dapat mengancam keselamatan masyarakat. Pemerintah perlu menyadari jika masyarakat tetap bertahan di tempat asalnya akan berpretensi menimbulkan efek berantai (domino). Efeknya adalah akan banyak warga yang ikut-ikutan melakukan tindakan yang sama yaitu tidak mau direlokasi. *Kedua*, banyak warga masyarakat yang bersedia direlokasi tetapi tetap ingin memiliki tanah mereka di tempat tinggal asal dengan alasan tanah di tempat asal lebih luas dari tanah yang diberikan oleh pemerintah. Berkaitan dengan masalah ini, pemerintah dapat mengambil kebijakan memberikan hak pengelolaan atas tanah di tempat asal mereka, tetapi tidak boleh dijadikan hunian tetap. Dengan kata lain, masyarakat boleh berusaha dan bekerja di KRB, tetapi tidak diizinkan tinggal dan menetap di situ karena KRB harus steril dari permukiman.

Terkait komunikasi bencana pemerintah Kabupaten Sleman telah memiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sleman berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2011

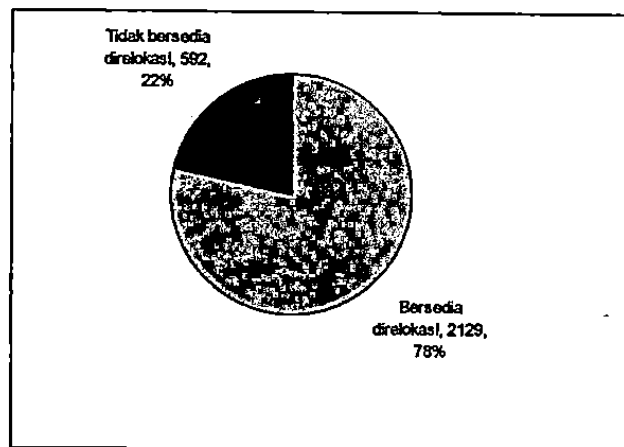
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sleman yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanggulangan bencana.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi di BPBD terdapat bidang yang khusus menangani rehabilitasi dan rekonstruksi yaitu Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari 2 seksi yaitu: Seksi Rehabilitasi dan Seksi Rekonstruksi. Dalam menjalankan tugasnya seksi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana merapi telah melakukan kegiatan "*Sosialisasi Persiapan Pendampingan REKOMPAK Untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Erupsi Merapi*" mempunyai tujuan untuk memberikan pemahaman tentang penatan kawasan lindung dan lokasi relokasi masyarakat korban yang tinggal di KRB III Merapi, termasuk penatagunaan lahannya serta untuk memberikan pemahaman tentang rancangan/desain rumah bagi korban bencana, baik bagi yang akan direlokasi maupun tinggal di tempat semula, dengan pendekatan pengurangan risiko bencana.

Dalam proses relokasi dan rehabilitasi masyarakat yang terkena dampak bencana di kawasan Merapi mengalami hambatan karena masyarakat lereng Merapi sangat bergantung pada kawasan hutan Merapi. Kebanyakan dari mereka berprofesi sebagai peternak, berkebun, penambang pasir, dan petani. Oleh karena itu, pemilihan daerah relokasi harus mempertimbangkan aspek ekonomi masyarakat. Daerah relokasi seharusnya tidak terlalu jauh dari

tokoh masyarakat apabila tokoh masyarakat bersedia untuk direlokasi maka warga masyarakat bersedia untuk ikut direlokasi, sehingga diperlukan manajemen komunikasi untuk meyakinkan masyarakat agar bersedia direlokasi ke tempat yang lebih aman.

Berdasarkan data dari Kabupaten Sleman dari 2.721 KK yang lolos kriteria untuk memperoleh hunian tetap, 2.129 KK bersedia direlokasi. Sedangkan 592 KK tidak mau direlokasi. Masyarakat yang tidak mau direlokasi berasal dari lima desa, yaitu Desa Umbulharjo (138 KK), Kepuharjo (40 KK), Glagaharjo (384 KK), Argomulyo (29 KK) dan Sindumartani (1 KK). (BAPPEDA Sleman, 2013)



Gambar 1. Warga yang Dilakukan Relokasi

Dalam pelaksanaan penanggulangan bencana Merapi di daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu yang terbaik dibandingkan penanggulangan bencana di daerah lain misalnya penanggulangan bencana di Pangandaran, penanggulangan bencana di Nias. Sehingga penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana strategi komunikasi bencana. Dan

Daerah (BPBD) Kabupaten Sleman dalam relokasi dan rehabilitasi pasca bencana Merapi untuk mengurangi risiko bencana di kawasan rawan bencana.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, dapat ditarik rumusan masalah berikut ini.

“Bagaimana manajemen komunikasi bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sleman dalam relokasi dan rehabilitasi pasca bencana Merapi untuk mengurangi risiko bencana di kawasan rawan bencana?”

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana manajemen komunikasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sleman dalam Relokasi dan Rehabilitasi Pembangunan Hunian Tetap Pasca Bencana Merapi untuk rangka mengurangi risiko bencana di kawasan rawan bencana.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian diharapkan dapat :

- a. Memberikan kontribusi pada kajian strategi komunikasi bencana.
- b. Menjadi bahan kajian studi banding dalam rangka penelitian lebih lanjut tentang manajemen komunikasi bencana di daerah lain.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian diharapkan menjadi saran bagi Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Sleman sebagai bahan pertimbangan

dalam pengambilan keputusan dalam menentukan kebijakan penanggulangan bencana, relokasi dan rehabilitasi pasca bencana di Kabupaten Sleman.

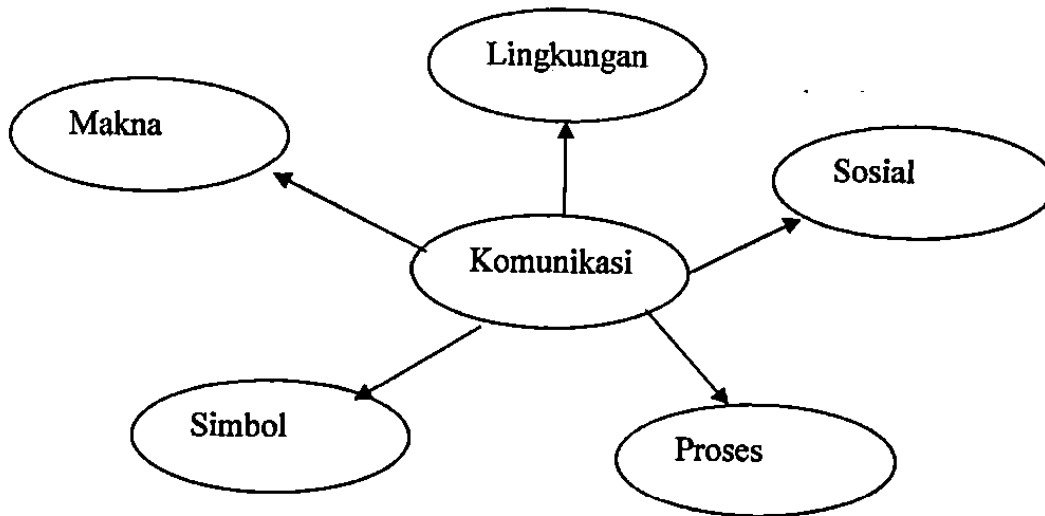
E. Kerangka Pemikiran

1. Manajemen Komunikasi Bencana

Konsep tentang manajemen komunikasi bencana masih perlu dikaji secara luas dan mendalam. Banyak definisi tentang manajemen komunikasi dan bencana, namun pengertiannya masih terpisah-pisah. Sebelum mendiskusikan tentang manajemen komunikasi bencana, maka perlu mendeskripsikan tentang: manajemen, komunikasi dan bencana. Manajemen merupakan sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan: perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan dan pengawasan, yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber – sumber lain (Terry, 2005). Menurut Handoko (2003:8) manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan dengan memberdayakan anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Manajemen dibutuhkan oleh semua organisasi, karena tanpa manajemen, semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan sulit. Paling kurang ada tiga alasan utama mengapa manajemen itu dibutuhkan. Pertama: untuk mencapai tujuan: kedua; untuk menjaga keseimbangan diantara tujuan-tujuan, sasaran-sasaran dan kegiatan-kegiatan dari pihak-pihak

berkepentingan dalam organisasi: ketiga: mencapai efisiensi dan efektifitas. Inti dari manajemen adalah suatu program yang terencana, terorganisir, dan terimplementasi secara efektif dan efisien, serta dievaluasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Komunikasi merupakan proses sosial dimana individu-individu menggunakan simbol-simbol untuk menciptakan dan menginterpretasikan makna dalam lingkungan mereka.



Gambar 2. Definisi Komunikasi (West and Turner, 2007: 5)

Gambar di atas mendeskripsikan bahwa komunikasi merupakan suatu proses yaitu suatu kejadian yang berkesinambungan, dinamis dan tidak memiliki akhir. Sosial artinya manusia selalu berinteraksi dengan manusia lain dalam suatu kelompok. Simbol berarti suatu label yang diberikan kepada sebuah fenomena. Simbol konkret yaitu simbol yang mempresentasikan sebuah objek, dan simbol abstrak mempresentasikan sebuah ide, gagasan, atau pemikiran. Makna merupakan sesuatu yang

makna, dan makna memiliki konsekuensi budaya. Sedangkan lingkungan adalah situasi atau konteks dimana komunikasi terjadi, terkait dengan waktu, tempat periode sejarah, relasi dan latarbelakang budaya antara pihak-pihak yang berkomunikasi.

Komunikasi adalah suatu proses interaksi timbal balik antara satu individu atau sekelompok individu dengan individu lain yang bertujuan untuk menciptakan kesamaan makna, artinya apa yang disampaikan oleh komunikator dapat dimengerti dan dimaknai sama oleh komunikan, dan sebaliknya posisi komunikator dan komunikan saling bergantian. Pada saat berbicara disebut komunikator, sementara pada saat mendengarkan disebut komunikan.

Bencana menurut Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang

Penanganan Bencana adalah:

1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan /atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
2. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain, berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
3. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit
4. Bencana sosial, adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat dan

Dengan kata lain, bencana adalah suatu peristiwa yang terjadi, akibat faktor alam atau manusia yang mengganggu tatanan kehidupan misalnya bencana banjir, gunung meletus, gempa bumi, teror bom, konflik poso dan lain-lain.

Menurut Lestari (2011:87) manajemen komunikasi bencana adalah penanggulangan masalah bencana yang melibatkan proses komunikasi, koordinasi antara masyarakat, pemerintah, pendonor dan LSM. Pendonor dalam bencana adalah lembaga atau perusahaan yang mengeluarkan dana untuk penanggulangan bencana, sedangkan LSM adalah lembaga swadaya yang berpartisipasi dalam pelaksanaan, pengawasan penanggulangan bencana.

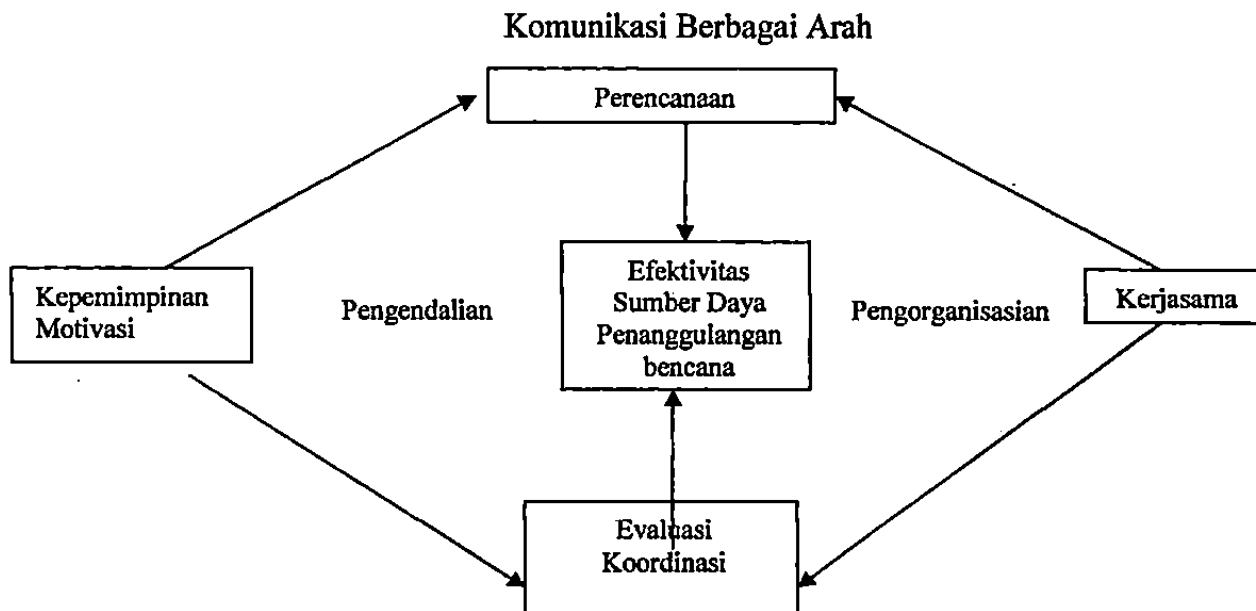
Manajemen bencana merupakan serangkaian kegiatan yang dibuat untuk mengendalikan situasi bencana dan darurat untuk mempersiapkan bantuan bagi masyarakat untuk menghindari atau mengatasi dampak bencana tersebut. Pelibatan proses komunikasi tentunya mengacu pada perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian yang merupakan empat prinsip utama manajemen demi mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Selanjutnya disebutkan bahwa koordinasi memerlukan:

1. Manajemen penanggulangan masalah bencana yang baik
2. Adanya tujuan peran, dan tanggung jawab yang jelas dari organisasi
3. Sumber daya dan waktu yang akan membuat koordinasi berjalan
4. jalannya koordinasi berdasarkan adanya pertukaran informasi dari berbagai sumber informasi yang berbeda (Lestari, 2011:87)

1. Komunikasi berbagai arah dari berbagai pihak yang dikoordinasikan
2. kepemimpinan dan motivasi yang kuat disaat krisis
3. kerjasama dan kemitraan dari berbagai pihak
4. koordinasi yang harmonis (Lestari, 2011:87)

Keempat syarat tersebut dipadukan untuk menyusun perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi penanggulangan bencana.

Secara sederhana poin-poin di atas dapat disederhanakan dalam model bagan sebagai berikut:



Gambar 3. Kerangka Konsep Manajemen Komunikasi Bencana
 Sumber : (Lestari, 2006: 199)

Bencana sendiri tidak dapat diperkirakan seberapa besar dampak yang akan ditimbulkan jika bencana tersebut terjadi, baik bencana gempa banjir, tanah longsor, hingga tsunami. Manajemen bencana merupakan serangkaian kegiatan yang dibuat untuk mengendalikan situasi bencana dan darurat dan mempersiapkan bantuan bagi masyarakat yang rentan bencana untuk

berkaitan dengan situasi yang terjadi pra bencana, selama bencana dan pasca bencana. Selain itu manajemen bencana merupakan proses pembentukan atau penetapan tujuan bersama serta mendorong pihak-pihak yang terlibat (partisipan) untuk menyusun rencana dan menghadapi bencana yang potensial.

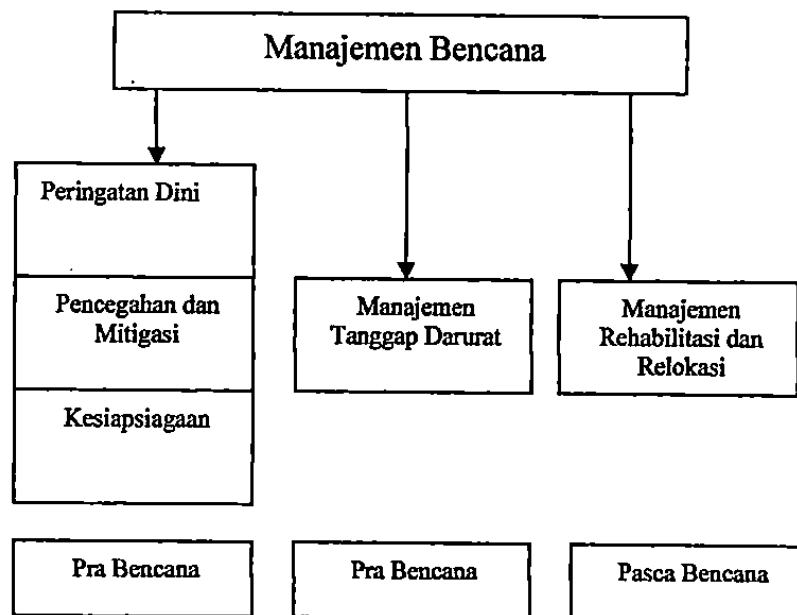
Pengelolaan manajemen bencana tidak bisa dilakukan hanya dengan cara tiba-tiba ketika bencana akan terjadi, tetapi harus dilakukan terencana dengan manajemen yang baik. Pada dasarnya penanggulangan bencana merupakan serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.

Manajemen bencana juga sebagai sebuah kepentingan publik yang bertujuan untuk mengurangi korban nyawa dan kerugian harta benda. Wujud dari manajemen bencana adalah adanya suatu langkah nyata dalam mengendalikan bencana sehingga korban yang tidak diharapkan dapat terselamatkan, dan upaya untuk pemulihan pasca bencana dapat dilakukan dengan cepat dan efektif. Manajemen bencana yang diartikan sebagai penerapan pengetahuan yang secara teratur mengamati dan menganalisis bencana yang meliputi tahapan: pencegahan, mitigasi, perencanaan sistematis terhadap keadaan darurat, tanggap darurat, dan recovery (rekonstruksi) sebagai hal yang berulang penerapannya.

Menurut UNDP, manajemen bencana adalah upaya sistematis dan komprehensif untuk menanggulangi semua kejadian bencana secara cepat

tepat dan akurat untuk menekan korban dan kerugian yang ditimbulkannya (Ramli, 2010: 11).

Berikut adalah gambaran jelas mengenai kegiatan manajemen bencana menurut Ramli (2010:31) mencoba menjelaskan tiga tahap rangkaian dalam proses manajemen bencana mulai dari tahap bencana, saat bencana, dan pasca bencana.



Gambar 4. Tahapan Manajemen Bencana (Ramli, 2010:3)

Kegiatan-kegiatan manajemen bencana

a. Pra bencana

Tahap manajemen bencana yang pertama adalah pada kondisi sebelum kejadian atau pra bencana meliputi kesiapan, pencegahan, peringatan dini, dan mitigasi. Pada tahap awal ini seluruh kegiatan difokuskan agar pencegahan terhadap dampak bencana sebelum terjadi dengan harapan pada penanganan bencana bencana yang terjadi

sebelumnya untuk mampu meminimalisir resiko yang akan terjadi dengan langkah-langkah berikut:

1) Kesiapan (*preparedness*)

Dalam tahap kesiapan ini sudah tertera pada UU penanggulangan bencana tahun 2007. Khususnya mengenai kesiapan ini pemerintah mengklasifikasikan tahap ini merupakan tahap yang paling utama dalam sebuah manajemen bencana yang dilakukan oleh sebuah organisasi seperti Badan Penanggulangan Bencana. Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna (UU No 24 Tahun 2007). Misalnya penyiapan sarana komunikasi, pos komando, penyiapan lokasi evakuasi, rencana kontigensi, dan sosialisasi peraturan atau pedoman penanggulangan bencana.

2) Peringatan Dini (*early warning*)

Sebelum terjadi bencana perlu dilakukan langkah persiapan serta peringatan dini. Langkah ini sangat perlu dilakukan untuk memberi peringatan kepada masyarakat tentang bencana yang akan terjadi sebelum kejadian. Peringatan dini adalah upaya memberikan tanda peringatan bahwa bencana kemungkinan akan terjadi. Serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang (UU No 24 Tahun 2007). Dalam pemberian

kegiatan tersebut harus mampu menjangkau masyarakat segera , tegas tidak membingungkan, bersifat resmi.

3) Mitigasi (*mitigation*) dan pencegahan (*prevention*)

Pencegahan sendiri merupakan upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya bencana (jika mungkin dengan meniadakan bahaya). Berikutnya berkaitan dengan kesadaran masyarakat juga menjadi tujuan dalam tahap manajemen bencana selanjutnya, kesadaran masyarakat ini dibangun agar mampu meningkatkan upaya serta kemampuan ketika bencana akan terjadi, apa saja yang akan dilakukan. Selain itu pembangunan fisik yang terdapat di wilayah rawan bencana tersebut, mulai dari jembatan, tanggul hingga bangunan seperti posko-posko pemantau bencana.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 dinyatakan bahwa mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana.

Sedangkan menurut UU Nomor 24 Tahun 2007 mitigasi bencana adalah upaya yang ditimbulkan untuk meminimalkan dampak yang mungkin ditimbulkan oleh bencana serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun

Menurut Ramli (2010:33) ada 4 model pendekatan yang dilakukan dalam mitigasi bencana, yang harus dilakukan secara terencana sebagai berikut:

a. Pendekatan teknis

Secara teknis mitigasi bencana dilakukan untuk mengurangi dampak suatu bencana, misalnya struktur (membuat bendungan, tanggul sungai, rumah tahan gempa dll). Mitigasi non struktural (peraturan perundang-undangan, pelatihan dll).

b. Pendekatan manusia

Pendekatan secara manusia maksudnya, bertujuan untuk membentuk manusia yang paham dan sadar mengenai bahaya bencana. Maka dari itu, perilaku dan cara hidup harus diperbaiki dan sesuai dengan kondisi lingkungan serta potensi bencana yang sewaktu-waktu muncul di lingkungan tersebut.

c. Pendekatan administratif

Misalnya pemerintah atau organisasi bisa melakukan pendekatan administratif ketika manajemen bencana dilakukan, khususnya pada tahap mitigasi penyusunan tata ruang serta tata lahan yang memperhitungkan aspek risiko bencana. Penerapan kajian bencana untuk setiap kegiatan dan pembangunan industri yang memiliki risiko tinggi. Mengembangkan program pembinaan dan pelatihan bencana di seluruh tingkat masyarakat dan lembaga pendidikan. Menyiapkan aturan tanggap darurat

serta organisasi tanggap darurat di setiap organisasi baik itu pemerintahan maupun industri yang berisiko tinggi.

d. Pendekatan kultural

Masyarakat pada umumnya masih menganggap bahwa terjadinya bencana merupakan suatu takdir, dengan kata lain masyarakat menerima apa yang terjadi pada mereka termasuk ketika bencana menimpa. Padahal paradigma ini bisa salah dan harus dirubah karena pada dasarnya manusia memiliki kemampuan berfikir serta berbuat, kemampuan tersebut dapat menjadi suatu upaya untuk mencegah terjadinya bencana dan sekaligus mengurangi dampak yang ditimbulkannya. Maka dari itu, perlu adanya pendekatan kultural sebagai indikator untuk meningkatkan kesadaran masyarakat berparadigma tersebut. Terutama kesadaran dalam tanggap bencana, tentu pendekatan ini dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai kearifan masyarakat lokal yang memiliki budaya tertentu secara turun temurun. Pemerintah daerah seharusnya mampu menyentuh budaya serta tradisi lokal yang ada pada masyarakat tersebut untuk tujuan membangun pentingnya kesadaran akan bencana di tengah masyarakat.

b. Saat Bencana

Tahapan paling utama dan penting dalam manajemen bencana sesungguhnya adalah saat bencana terjadi. Meskipun telah dilakukan

peringan dini, serta penginformasian kepada masyarakat yang berpotensi terkena dampak bencana, namun sebagian besar kasus biasanya terjadi bencana akan memakan korban dalam kemungkinan yang kecil sekalipun. Apalagi bencana seperti gempa bumi yang masih sulit diperkirakan.

Maka dari itu diperlukan langkah-langkah seperti tanggap darurat untuk mengatasi dampak bencana dengan cepat dan tepat agar jumlah korban dan kerugian yang ditimbulkan dapat diminimalisir.

1) Tanggap Darurat (*Response*)

Saat bencana terjadi yang perlu diperhatikan adalah proses tanggap darurat, yakni respon pemerintah untuk segera melakukan tindakan penanganan dampak yang ditimbulkan bencana saat bencana terjadi. Pemerintah diharapkan memiliki respon yang cepat ketika tanggap darurat ini dilakukan dengan mengandalkan alat komunikasi serta alat pemantau yang telah terpasang di wilayah terkena bencana tersebut. Inilah gunanya seluruh fasilitas tersebut diaplikasikan ke masyarakat, agar masyarakat dengan segera menginformasikan keadaan saat bencana melanda wilayah mereka.

Menurut Ramli (2010:35), tanggap darurat adalah, serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menanggulangi dampak buruk yang ditimbulkan, meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana

2) Bantuan Darurat (*relief*)

Pemberian berbagai bantuan menjadi bagian dari upaya terpenting saat bencana terjadi, langkah ini merupakan upaya untuk memberikan bantuan berkiatan dengan pemenuhan kebutuhan dasar berupa pangan, sandang, tempat tinggal sementara, kesehatan, sanitasi dan air bersih. Karena hal inilah yang sangat diperlukan dan rawan bagi masyarakat terkena bencana.

c. Pasca Bencana

Manajemen pasca bencana adalah tahap yang perlu tindakan maksimal untuk memulihkan seluruh aspek-aspek yang terkena dampak bencana, seperti aspek komunikasi, bangunan dan lain-lain. Pasca terjadinya bencana dan setelah proses tanggap darurat dilewati, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi.

1) Pemulihan (*recovery*)

Dalam tahap pemulihan atau *recovery* terdapat sebuah proses pemulihan darurat kondisi masyarakat yang terkena dampak bencana, dengan memfungsikan kembali prasarana dan sarana pada keadaan semula. Upaya yang dilakukan adalah memperbaiki prasarana dan pelayanan dasar (jalan, listrik, air bersih, pasar, puskesmas, dll)

2) Rehabilitasi (*rehabilitation*)

Rehabilitasi adalah langkah yang diambil setelah kejadian

1. ... untuk membantu masyarakat memperbaiki perumahan, fasilitas

umum dan fasilitas sosial penting untuk menghidupkan kembali roda perekonomian.

Menurut Ramli (2010:38), rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.

3) Rekonstruksi (*reconstruction*)

Rekonstruksi merupakan program jangka menengah dan jangka panjang guna perbaikan fisik, sosial dan ekonomi untuk mengembalikan kehidupan masyarakat pada kondisi yang sama atau lebih baik dari sebelumnya.

Menurut Ramli (2010:38), rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.

4) Mengontrol Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Rehabilitasi dan rekonstruksi terdiri dari sebagian besar dari fase pemulihan bencana. Secara spesifik, rehabilitasi adalah tindakan-

tindakan yang dilakukan setelah terjadi bencana

memungkinkan pelayanan-pelayanan dasar guna memfungsikan kembali, membantu para korban dengan usaha mandiri untuk memperbaiki tempat tinggal dan fasilitas-fasilitas komunitas, serta memberikan fasilitas terhadap bangkitnya kembali aktivitas-aktivitas ekonomi. Sedangkan rekonstruksi adalah konstruksi permanen atau penggantian bangunan-bangunan fisik yang rusak parah dan infrastruktur lokal, serta penguatan ekonomi. Tujuan rehabilitasi dan rekonstruksi adalah untuk mendorong dan membantu pemulihan bantuan selama ase pasca bencana (UNDP, 1992).

Pada fase ini penduduk yang terkena dampak bencana dapat secara aktif berpartisipasi dalam pengkajian, perancangan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program bantuan. Partisipasi orang-orang yang terkena dampak bencana dalam pembuatan keputusan di semua tahapan siklus proyek (pengkajian, perancangan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program bantuan) membantu untuk memastikan pelaksanaan program-program yang berkeadilan dan efektif. Untuk itu harus dilakukan upaya khusus memastikan keikutsertaan perwakilan orang-orang secara seimbang dalam program bantuan, termasuk kelompok rentan dan kelompok terpinggirkan. Partisipasi harus memastikan bahwa program-program didasarkan pada kerelaan orang-orang yang terkena dampak bencana untuk bekerjasama bahwa program-program tersebut

Pada fase rehabilitasi dan rekonstruksi ini peran penting media terletak pada fungsi kontrol sosial. Karena pada fase ini banyak penyimpangan yang berpotensi terjadi. Bahkan tidak sedikit media massa yang hilang kegarangannya sebagai “watchdog” setelah mencicipi legitnya dana rehabilitasi dan rekonstruksi. Malemi (2009) menulis, kehadiran BRR dan lembaga donor di Aceh menjadi benteng pertahanan bagi media baru. Mereka sangat mengadalkan duit pariwisata dari lembaga-lembaga yang memang memerlukan pencitraan positif. Persoalannya media sebagai kontrol sosial berkewajiban terus menerus memelototi lembaga-lembaga tersebut yang menjadi saluran gelontoran uang untuk membangun kembali pasca bencana terjadi.

Masalah lain yang tidak boleh luput dari kontrol media adalah partisipasi penanganan bencana. Dimana Prasodjo (2011) mengkritisi, saat ini penanganan bencana yang dijalankan pemerintah masih lambat, berbelit-belit, birokratis. Bahkan ada pihak alih-alih berfikir mencari jalan keluar memperkuat manajemen bencana, malah menjadikan bencana sebagai ajang kampanye politik.

2. Manajemen Informasi Bencana

Informasi merupakan bagian dari proses komunikasi, yang pada hakikatnya bertujuan menyampaikan pikiran atau perasaan komunikator kepada komunikan yakni orang lain. Menurut Effendy (2007:11), perasaan tersebut bisa berupa keinginan, kepastian, keagungan, ketertarikan,

Manajemen informasi adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengaktifan dan pengawasan yang dilakukan untuk menyampaikan data yang sudah diolah sedemikian rupa untuk mengurangi ketidakpastian untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.

Begitu juga dalam proses manajemen di suatu organisasi yang dalam penelitian ini adalah Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Sleman melakukan proses penyampaian informasi serta penyebaran informasi yang berkaitan dengan bencana dilakukan kegiatan komunikasi dua macam, baik komunikasi ke bawah maupun komunikasi ke atas. Dalam melaksanakan kegiatan komunikasi ke bawah, informasi dapat dilakukan dengan:

- a. Mengadakan rapat
- b. Memasang pengumuman
- c. Menerbitkan majalah intern

Sedangkan dalam membina komunikasi ke atas yakni antara masyarakat dan pemerintah dilakukan dengan:

- a. Mengadakan pertemuan untuk menampung pendapat
- b. Mengadakan kotak saran (email) untuk menampung saran-saran bagi kepentingan organisasi dan masyarakat

Informasi adalah data yang sudah diolah dengan cara tertentu sesuai bentuk yang kita inginkan (Amsyah, 1997:5). Lebih lanjut dapat dilihat pada konsep informasi sebagai berikut:

Aliran Informasi



Bagan 5. Aliran Informasi

Sumber : Amsyah, 1997: 5

Informasi identik dengan data bila dipandang dari jenis kegiatan organisasi maka informasi dikelompokkan menjadi dua macam:

1. Informasi substantif, adalah informasi yang berkaitan dengan kegiatan pokok dari suatu organisasi. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan atau bidang utama dari suatu organisasi, sesuai dengan tujuan utama dari organisasi
2. Informasi fasilitatif, adalah informasi yang berkaitan dengan kegiatan pendukung suatu organisasi

Nilai informasi atau manfaat informasi adalah untuk membantu memberi kejelasan dari suatu ketidakpastian atau untuk mengurangi ketidakpastian tersebut, sehingga manusia dapat membuat suatu keputusan dengan keyakinan yang lebih baik dan menguntungkan.

Pelaksanaan manajemen informasi tanggap bencana, tetap dilakukan dalam tahapan yakni tahap tanggap darurat, tahap rekonstruksi dan rehabilitasi, tahap pencegahan (preventif) dan mitigasi, dan tahap kesiapsiagaan (preparedness). Kepala Daerah sebagai penanggungjawab penanganan bencana mestinya juga memiliki sistem pendukung pengambilan keputusan alias Decision Support System (DSS) bencana alam. Sehingga pada penerapan manajemen informasi yang mencakup manajemen komunikasi bencana di dalamnya bisa berjalan efektif sesuai tahapan-tahapan manajemen komunikasi penanggulangan bencana. Berikut diuraikan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam manajemen informasi:

a. Manajemen Informasi Pra Bencana

Sistem informasi bencana yang akan dilakukan terlebih dahulu penetapan spesifikasi dan ketentuan-ketentuan teknisnya. Hal tersebut akan menentukan keberhasilan pengembangan informasi sekaligus menjadikan perencanaan dan implementasi informasi dapat berlangsung dengan sistematis dan terarah. SIG merupakan suatu sistem yang mengorganisir perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software, dan data serta dapat mendayagunakan sistem penyimpanan, pengolahan, maupun analisis data secara simultan, sehingga dapat diperoleh informasi yang berkaitan dengan aspek keruangan.

Geographic information system (GIS/SIG) merupakan komputer yang berbasis pada sistem informasi yang digunakan untuk memberikan bentuk digital dan analisis terhadap permukaan bumi. Definisi

GIS selalu berubah karena GIS merupakan bidang kajian ilmu dan teknologi yang relatif masih baru. SIG merupakan manajemen data spasial dan non-spasial yang berbasis komputer dengan tiga karakteristik dasar yaitu: 1) mempunyai fenomena aktual (variabel dan non-lokasi), yang berhubungan dengan topik permasalahan di lokasi yang bersangkutan. 2) merupakan suatu kejadian di suatu lokasi dan 3) mempunyai dimensi waktu (Purwadhi, 1994).

Sistem informasi penanggulangan bencana Indonesia (SIPBI) yang berbasis GIS sebagai suatu sistem komputerisasi dengan empat kemampuan untuk menangani data bereferensi geografis, yaitu: pemasukan, pengolahan atau manajemen data (penyimpanan dan pengaktifan kembali) manipulasi dan analisis, serta keluaran sangatlah tepat untuk diterapkan. Saat ini GIS juga sudah dapat diimplementasikan sedemikian rupa sehingga dapat bertindak sebagai map-server melalui jaringan lokal maupun jaringan internet (*web-based*).

b. Manajemen Informasi saat Bencana

Ketika bencana terjadi, dibutuhkan sebuah sistem informasi yang memungkinkan korban, maupun relawan, pemerintah, tim SAR saling berinteraksi dan berkoordinasi satu sama lain. Menolong warga yang sedang kesulitan dan menolong menyelamatkan jiwa secara efisien dengan menggunakan IT. Membantu kerjasama antara berbagai aktor di lapangan, seperti pemerintah, stakeholder : SATKORLAK, TNI, POLRI, NGO,

bencana. Masukan ke sistem dapat berupa laporan dari tim SAR, relawan, bahkan masyarakat melalui HP maupun telepon. Akses ke sistem akan lebih mudah jika dapat dilakukan melalui internet. Akan lebih baik lagi jika informasi yang diberikan dapat berupa peta sehingga memudahkan bagi pengguna untuk menentukan lokasi mana yang tertimpa bencana yang parah, dimana lokasi korban, dimana lokasi kerusakan dan masih banyak lagi.

Informasi yang dihasilkan bisa berbentuk data geografis yang dapat menginformasikan keadaan bencana dengan cepat. Data geografis merupakan data unit atau area yang tersebar secara geografis yang terbagi menjadi dua bagian. Yakni data spesial (data lokasi, posisi) dan data tekstual (data deskripsi teknis, historis, administrasi, dan lain-lain). Basis data yang diperlukan untuk pengembangan sistem informasi bencana alam meliputi data peta kawasa, data infrastruktur, data kependudukan, data kepemilikan tanah dan rumah dan data infrastruktur di daerah.

c. Manajemen Informasi Pasca Bencana

Dukungan sistem informasi pasca terjadinya bencana alam sangat diperlukan untuk memperlancar proses indentifikasi para korban, kerugian materi dan infrastruktur. Dukungan proses komunikasi dan informasi tersebut juga dapat menjadi suatu pengambilan keputusan guna mengambil langkah-langkah rehabilitasi pasca terjadinya bencana.

Untuk mewujudkan sistem informasi bencana diperlukan sinergisasi dengan SIAP (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan)

dan data pemukiman seperti jumlah rumah, data infrastruktur dan data kawasan yang ada di daerah tersebut. Dari data tersebut nantinya dapat dibuat sistem informasi geografis yang memperhatikan informasi sebelum dan sesudah terjadi bencana dengan kerugian jiwa, materi dan sarana-prasarana di daerah terjadi bencana.

Namun tidak dapat dikesampingkan bahwa, bencana alam memiliki dimensi komunikasi yang kompleks dalam pencegahan maupun penanganannya. Menurut Menteri Sosial Bachtiar Chamsah (26 Juli 2007), kendala klasik dalam menangani bencana yang cenderung muncul adalah :

1. Intensitas dan kapasitas bencana yang semakin meningkat, dimana beberapa peristiwa bencana dengan skala besar seringkali berada di luar jangkauan pelayanan, sebagai akibat faktor lokasi dan rusaknya infra struktur sistem penanggulangan bencana
2. Keterbatasan potensi dan sistem sumber yang dapat diidentifikasi dan didayagunakan pada saat bencana, sebagai akibat miskinnya budaya kita dalam membuat perencanaan kontingensi bencana.
3. Lemahnya koordinasi lintas sektoral (ego sektoral) baik di tingkat provinsi maupun kabupaten-kota
4. Keterbatasan dana on call yang dapat sewaktu – waktu dipergunakan.
5. Sistem birokrasi dan administrasi yang kurang kondusif berkaitan dengan otonomi daerah
6. Keterbatasan SDM terlatih dalam penanggulangan bencana

7. Sikap mental sebagian masyarakat/ korban bencana yang masih kurang kondusif.

Sedemikian banyak problem komunikasi dalam penanggulangan bencana, tetapi dengan prinsip koordinasi yang mengandalkan model komunikasi semua saluran, mestinya pihak yang terkait dengan tanggungjawab bencana dapat membentuk sinergi untuk membantu korban. Meskipun demikian, tetap saja berkembang asumsi bahwa, pemerintah dalam mengantisipasi bencana “tanggap-darurat” masih serba reaktif. Karena itu, meskipun pemerintah telah membuat jaringan informasi berbasis teknologi tinggi untuk mendeteksi bencana, tetapi masih banyak persoalan yang belum dapat diatasi sesuai harapan korban maupun masyarakat, yang menghendaki kesigapan negara dalam menjalankan manajemen bencana.

Komunikasi Integratif Penanganan Bencana

Penanganan bencana yang berlandaskan kepada peraturan, jika ditinjau dari aspek legal, memang dapat dipertanggungjawabkan. Namun nuansa birokratis yang berbelit – belit, tetap tidak bisa dihindari. Karena itu, mengingat aspek legal wajib dijalankan, sedangkan penanganan bencana harus dilakukan dengan cepat, maka peran komunikasi dalam menyampaikan informasi secara cepat, merupakan salah satu jalan untuk mendukung penanganan bencana yang eskalasinya meningkat.

Myers dan Myers (1988:4) berpendapat, bahwa komunikasi dimaksudkan untuk berbagi informasi dan mengurangi kekakuan dalam organisasi. Jadi, komunikasi dapat meningkatkan suatu fleksibilitas dalam pelaksanaan

kegiatan organisasi tanpa harus melakukan penyimpangan terhadap peraturan yang ada. Dalam pemikiran konvensional, komunikasi merupakan pengungkapan diri yang berjalan sesuai dengan aturan atau norma yang berlaku sebagai hak dan kewajiban setiap orang yang terlibat didalamnya (Littlejohn & Foss, 2009 :189). Dengan demikian, komunikasi dapat menciptakan fleksibilitas dalam pelaksanaan kegiatan, namun tetap berpijak kepada aturan dan norma yang disepakati bersama.

Menurut Bachtiar Chamsah (2007: 9), dalam implementasi penanggulangan bencana, pemerintah daerah harus menyusun *Contingency Plan* Penanggulangan Bencana, yang mencakup analisa daerah rawan bencana, identifikasi potensi dan sistem sumber yang dapat dimobilisasi, menentukan kebijakan serta langkah strategis jika terjadi bencana.

Pada konteks ini, masyarakat harus diposisikan sebagai subyek, bukan sebagai obyek dalam penanggulangan bencana, sehingga mereka mengetahui ancaman di wilayahnya dan mampu meningkatkan kapasitas menghadapi ancaman melalui Program Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat. Karena itu, diperlukan deregulasi sistem pengawasan dan pengendalian bencana dengan aturan khusus dalam kondisi darurat, yang bisa memangkas birokrasi pemberian bantuan dan mempersingkat proses komunikasi berjenjang menjadi pola komunikasi yang integratif dalam waktu yang cepat.

Kecepatan dalam komunikasi untuk pengambilan keputusan dan sistem komunikasi yang terhubung antar lembaga peduli bencana, akan

berjalan lancar jika manajemen informasi bencana dikelola dengan interaktif. Harjadi (2007:17), mengungkapkan acuan penanggulangan bencana (tsunami), tidak bisa lepas dari fungsi komunikasi, yang memberikan sinyal untuk mengurangi ketidakpastian, sebagai berikut :

1. Memasang sarana diseminasi informasi, termasuk :”dedicated link”(saluran Komunikasi khusus), radio Internet , server untruk system “5 in One”dan sirene, sehingga informasi dari BMG dapat diterima secepat – cepatnya.
2. Membuat peta jalur evakuasi dan zona evakuasi dan rambu – rambu bahaya tsunami di sepanjang pantai yang rawan tsunami.
3. Membangun shelter pengungsian yang dilengkapi dengan jalan dari pemukiman penduduk ke shelter, serta sarana dan prasarana darurat di pengungsian.
4. Mengadakan pelatihan evakuasi baik untuk masyarakat pesisir maupun aparat terkait, secara berkala 2 (dua) kali setahun, dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi tsunami.
5. Memfasilitasi peningkatan pemahaman masyarakat melalui Pendidikan formal dan nonformal.
6. Tindakan – tindakan tersebut diatas, berkaitan dengan konsep – konsep komunikasi Bower dan Bradac. Misalnya dalam membuat peta jalur evakuasi dan membangun shelter pengungsian, selayaknya jika diperhatikan komunikasi sebagai pertukaran gagasan verbal, proses interaksi yang saling memberikan pemahaman, mengurangi ketidakpastian, penyampaian pesan dan transfer pemahaman, proses untuk menghubungkan satu entitas dengan entitas lain

Sedangkan dalam pelatihan dan peningkatan pemahaman kepada masyarakat, menyangkut pula komunikasi sebagai proses yang mendorong suatu tindakan untuk menguasai dengan memanfaatkan saluran untuk mengirimkan pesan, mengeluarkan stimulus untuk memperoleh respon yang diharapkan, memiliki maksud untuk mendorong munculnya perilaku yang dikehendaki.

Mengingat komunikasi juga terkait respon yang berbeda, ketersediaan

yang berhubungan langsung dengan penanganan bencana, harus membuat pusat informasi bencana yang mengeluarkan informasi standar, faktual dan mudah diakses oleh masyarakat. Sebab bagaimanapun juga komunikasi adalah kekuatan untuk mempengaruhi khlayak.

Standarisasi informasi bukan berarti menghentikan kebebasan menyampaikan informasi, tetapi demi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, agar mereka dapat melakukan dengan bertumpu kepada kekuatan dan pengalaman diri sendiri, dalam meminimalisir dampak negatif, jika sewaktu – waktu muncul bencana di lingkungannya. (Susanto, 2006).

Namun memang tidak mudah untuk mengelola bencana dalam perspektif yang integratif, dalam arti ada kesinambungan komunikasi antar unit – unit yang ada sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap peristiwa bencana. Bukan rahasia umum lagi, problem koordinasi sebagaimana dalam job description lembaga sub – ordinat kekuasaan negara, sering dibelenggu oleh lemahnya komunikasi antar unit akibat menjalankan birokrasi yang teramat kaku. Implikasinya informasi seputar bencana dikeluarkan tidak kontinyu tetapi muncul pada saat tertentu dalam belenggu hiruk pikuk saat terjadi bencana yang bukan mustahil tidak menyentuh seluruh lapisan masyarakat.

Bagaimanapun juga, penyebaran informasi untuk mencegah jatuhnya korban, maupun untuk menyelamatkan nyawa manusia, tidak bisa dilakukan secara sporadis dan kurang menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Disisi lain, hak atas informasi adalah hak yang melekat dalam diri manusia (Haryanto,

dengan baik, harus disebarluaskan dengan memanfaatkan saluran komunikasi yang ada di masyarakat, seperti media massa dan media alternatif lain.

Boykoff dan Robert (dalam Susanna Hornig Priest, 2010: 145), menyatakan bahwa, liputan media massa menjadi kontributor utama dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat maupun tindakan yang harus diambil dalam menghadapi berbagai isu tentang lingkungan, teknologi dan resiko yang akan terjadi. Sedangkan McQuail (2005:57) menyatakan, khalayak media massa yang berjumlah besar, tersebar luas, heterogin dan tidak terorganisir bisa dipengaruhi oleh liputan media.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian studi kasus deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif bermaksud membuat pemeriaan (penyandaran) secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu. (Usman dan Akbar,1998:4).

Menurut Mardalis (1992) penelitian deskriptif adalah “penelitian yang bertujuan mendeskripsikan, menggambarkan apa yang saat itu berlaku, didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisa dan mengintrepetasikan”.

Studi kasus adalah suatu inkuiri empiris yang menyelidiki fenomena didalam konteks kehidupan nyata, bilamana batas-batas antara

fenomena dan konteks tak tampak dengan tegas dan dimana multi sumber bukti dimanfaatkan (Yin, 2000:18).

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sleman

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya dengan cara mengamati dan mencatat untuk pertama kalinya (Marzuki, 1986). Data ini didapat dari hasil wawancara dengan berbagai pihak yang mengetahui dan memahami tentang strategi komunikasi bencana dalam Dalam Relokasi Dan Rehabilitasi Pasca Bencana Merapi

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, namun didapat dari buku-buku, majalah, brosur dan dokumen-dokumen lainnya yang relevan dengan permasalahan yang akan dikaji (Marzuki, 1986).

4. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini sumber data yang penulis pilih adalah keu informan yang menurut penulis sesuai dengan penelitian ini. Key informan tidak hanya memberikan keterangan tentang sesuatu kepada peneliti, tetapi juga dapat memberikan saran tentang sumber-sumber bukti lain yang dapat

mendukung serta menciptakan akses terhadap sumber yang bersangkutan.

(Yin, 2002:105)

Informan penelitian ini adalah orang-orang yang memenuhi kriteria sebagai informan untuk dijadikan sumber informasi. Kriteria tersebut merupakan syarat sebagai informan yang mengetahui segala informasi dan pelaksanaan manajemen komunikasi penanggulangan bencana mulai dari proses komunikasi dan koordinasi kepada seluruh stakeholder yang bekerjasama dalam penanggulangan bencana khususnya pada tahap relokasi dan rehabilitasi bencana pembangunan hunian tetap pasca bencana Merapi.

Key informant tersebut adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Sleman. Alasan pengambilan informan tersebut, pertama karena beliau merupakan informan yang mengerti, memerintahkan koordinasi serta mengkomunikasikan proses pelaksanaan manajemen komunikasi bencana penanggulangan bencana di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sleman. Kedua pelaksana koordinator divisi penanggulangan bencana diserahkan sepenuhnya tanggungjawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sleman. Key informant lainnya adalah Kepala Desa di kawasan

5. Teknik Pengumpulan Data

Pada teknik pengumpulan data ini, data dikumpulkan secara langsung dari sumber yaitu dari seluruh informan yang telah peneliti klasifikasi sesuai kebutuhan penelitian ini, dan peneliti akan terjun langsung untuk mengumpulkan data analisa langsung. Data-data yang dikumpulkan berupa kata-kata gambar, melalui penerapan metode penelitian di lapangan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui:

a. Wawancara Mendalam

Wawancara adalah sebuah bentuk komunikasi yang terdiri dari dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu (Dedy Mulyana, 2002: 180).

Data utama dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan. Maka dari itu, wawancara secara mendalam sangatlah penting. Metode ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada informan yang mengarah kepada fokus penelitian, maka sebelum melakukan wawancara terlebih dahulu disusun garis besar pertanyaan yang akan ditanyakan kepada informan. Adapun informan yang dipilih adalah Kepala Bagian Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Sleman dan masyarakat di daerah rawan bencana yang direlokasi

b. Studi Pustaka

Metode studi pustaka adalah pencarian data dengan menggunakan data yang berasal dari buku-buku, surat kabar, catatan-catatan kerja, catatan-catatan khusus, literatur-literatur, serta sumber dokumen lain yang berhubungan dengan subyek yang diteliti untuk memperoleh teori dan fakta-fakta yang mendasar (Nawawi, 1998:133). Penelitian ini menggunakan data-data yang diambil dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sleman yakni catatan-catatan, dokumen-dokumen, dan laporan-laporan terkait komunikasi bencana relokasi dan rehabilitasi pembangunan hunian tetap pasca bencana merapi misalnya Rencana Strategis BPBD Kabupaten Sleman, Laporan Kinerja Akuntabilitas BPBD, Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Tahun 2011-2013.

6. Teknik Analisis Data

Bogdan dan Taylor (1975:79) mendefinisikan analisis data sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis (ide) seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan hipotesis itu.

Dalam penelitian ini, analisis data menggunakan model analisis interaktif. Menurut Miles dan Huberman dalam Pawito, 2007, analisis data sering kali dilakukan dengan menggunakan beberapa langkah sebagai

a. Pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, pengamatan langsung dan pengumpulan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

b. Reduksi data

Yaitu proses pemilihan dan pemusatan data-data yang relevan dengan masalah penelitian. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak diperlukan, mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan cara membuat ringkasan, mengkode data, dan membuat gugus-gugus. Proses transformasi ini berlangsung hingga laporan tersusun lengkap.

c. Penyajian data

Yaitu tahapan penggambaran fenomena sesuai dengan data yang telah direduksi. Penyajian data merupakan upaya penyusunan, pengumpulan informasi kedalam suatu matrik atau konfigurasi yang mudah dipahami. Penyajian data yang sederhana dan mudah dipahami adalah cara utama yang menganalisis data deskriptif kualitatif yang valid. Penyajian ini bisa dalam bentuk matrik, grafik atau bagan yang dirancang untuk menghubungkan informasi.

d. Menarik kesimpulan

Menarik kesimpulan adalah bagian yang menjadi salah satu bagian

6. Uji Validitas Data

Uji validitas data adalah upaya untuk meminimalisir distorsi yang mungkin akan mengotori data yang dihimpun oleh peneliti (Moleong, 1998:115). Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data. Sebenarnya ada empat teknik pemeriksaan menggunakan triangulasi dalam menguji keabsahan data menurut Lexy (1998:118) yaitu “sumber, metode, penyidik dan teori”.

Triangulasi data adalah membandingkan dan mengecek derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif (Moleong, 1998:110).